

Analisis Identifikasi Keberhasilan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pada Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat

Anggi Pratama Nst

Universitas Pembangunan Panca Budi
anggipratama@dosen.pancabudi.ac.id

Ikhah Malikhah

Universitas Pembangunan Panca Budi
ikhahmalikhah@dosen.pancabudi.ac.id

Denta Oktari

Universitas Pembangunan Panca Budi
anggipratama@dosen.pancabudi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/14790>

ABSTRACT

. This study uses primary data sources, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and additions from several community leaders in the Village environment. Then the data obtained and analyzed using descriptive research in obtaining the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of each Indicator so as to produce a Strategy for Successful Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). The results of the study identified that the SISKEUDES success strategy in Pematang Serai Village included among others 1) Improving the Quality of Village Vision, Mission and Goals that prioritize national/regional development issues in accordance with the availability of available resources 2) Improving the Quality of the Village Work Program in the RJPMD and RKP which have been analyzed by looking at the potential for income growth and the potential for village spending efficiency 3) Improving the quality of human resources in producing SISKEUDES information through continuous assistance from BPKP 4) Increasing the Development of Quality Human Resources through Cooperation Programs with educational institutions.

Keywords : Village Financial System (SISKEUDES), Accountabilty, SWOT

Cara Sitasi : Nst, A.P., Malikhah, I., Oktari, D..(2023). Analisis Identifikasi Keberhasilan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pada Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol 23.(1) 63--72. <https://doi.org/10.30596/14790>

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hubungan secara langsung dengan masyarakat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi hal terpenting dalam pengelolaan pemerintahan di Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa merupakan salah satu prioritas utama pemerintah sebagai bentuk perwujudan pembangunan disetiap daerah sehingga diharapkan dapat menjadikan desa maju, kuat, mandiri dan tetap berlandaskan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Didalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut telah diatur tentang kedudukan dan jenis Desa, Penataan Desa, Wewenang Desa dan Penyelenggaraan pemerintah Desa serta tentang Keuangan Desa. Sebagai bentuk Implementasinya, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri terbaru No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa atas perubahan dari Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tersebut dapat dijelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sedangkan dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa yang menggunakan sistem SISKEUDES tahun 2018 masih mengacu kepada Permendagri No. 113 tahun 2014. SISKEUDES sendiri merupakan pengembangan aplikasi tata kelola keuangan yang diluncurkan oleh BPKP yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui SK Mendagri No. 900.05-8366 Tahun 2018. Dalam rangka mendorong pelaksanaan SISKEUDES secara maksimal, BPKP bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa dibawah Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi secara bertahap tentang penerapan SISKEUDES pada setiap Desa yang ada di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan informasi dari BPKP per 31 Desember 2019, implementasi SISKEUDES telah mencapai 95,06% dari seluruh Desa yang ada di Indonesia yaitu berjumlah 71.249 Desa pada Kabupaten/ Kota dari 74.964 Desa pada setiap Kabupaten/ Kota sedangkan untuk Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan sebesar 98,4% yang berjumlah 73.751 desa dari 74.954 desa Kabupaten/ Kota atau di 430 Desa dari 434 Desa Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya, Hasil Penelitian Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019) menyebutkan bahwa SDM yang dimiliki Desa masih Rendah sehingga menyebabkan kesalahan pada saat pekerjaan dan masih terdapat beberapa laporan yang belum diinput kedalam sistem sehingga masih menggunakan pelaporan manual. Sejalan dengan Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020) menyebutkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak terlalu memperhatikan tentang akuntabilitas pada penggunaan keuangan desa sehingga informasi pentingnya tentang Fungsi Akuntabilitas masih sangat sulit diperoleh dari masyarakat. Penelitian tentang Sulistyowati, S. (2019) dinyatakan bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa masih dikatakan secara keseluruhan Cukup Baik. Kabupaten Langkat sendiri merupakan salah Kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki Desa yang cukup banyak yaitu berjumlah 240 Desa (sumber:wikipedia.org) yang terdiri tersebar pada 37 Kelurahan di 23 Kecamatan dimana terdapat salah satu desa yang sangat berkembang dengan baik yaitu Desa Pematang Serai yang terletak pada Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura dengan potensi menjadi Desa Wisata yang cukup berkembang selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik akan potensi desa dimana sangat diperlukan sekali tentang identifikasi awal tentang bagaimana Strategi tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa melalui SISKEUDES sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pada Desa Pematang Serai.

Adapun Rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah Apa – Apa saja Identifikasi Strategi Keberhasilan Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan Akuntabilitas Pada Desa Pematang Serai dan Tujuan penelitian dalam rancangan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Mengidentifikasi Strategi Keberhasilan Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan Akuntabilitas Pada Desa Pematang Serai.

SISKEUDES pada awalnya dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan bulan Mei 2015. Aplikasi ini diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa bulan Juni 2015. Setelah melalui tahapan Quality Assurance (QA) pada tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa telah diambil alih oleh Deputy Pengawasan bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jakarta. Penggunaan Aplikasi SISKEUDES harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sampel pemda dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES, fitur aplikasi ini dibuat user friendly dan sederhana dengan penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain Dokumen Penatausahaan, Bukti Penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), Laporan Penganggaran (PerdesAPBDesa, RAB, APBDesa per sumber dana), Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register). Saat ini Aplikasi SISKEUDES yang digunakan adalah SISKEUDES yang berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 yang berisikan 5 Indikator pengelolaan sesuai yang tertuang pada Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0 antara lain : Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Kompilasi Data.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan tujuan mendapatkan informasi yang diperoleh dalam menghasilkan analisis kejadian dan keadaan secara sosial. Adapun prosedur penelitian ini dimulai dari melakukan observasi/ pengamatan awal terhadap Identifikasi Keberhasilan Penerapan dari SISKEUDES lalu selanjutnya, peneliti melakukan pengambilan informasi terkait Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threats) sehingga diharapkan akan menghasilkan suatu Strategi Keberhasilan Pada Implementasi SISKEUDES dalam mewujudkan Akuntabilitas. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk memberikan hasil penelitian Strategi Apa yang harus dilakukan dalam keberhasilan Fungsi Akuntabilitas melalui SISKEUDES tersebut.

Untuk Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah SISKEUDES yang diartikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator 1) Perencanaan, 2) Penganggaran, 3) Penatausahaan, 4) Penatausahaan 5) Pelaporan, 6) Kompilasi Data. Dalam memperoleh data penelitian ini bersumber dari data primer yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kaur

Umum Desa yang informasi diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga nantinya menghasilkan Identifikasi Strategi Keberhasilan SISKEUDES melalui proses Analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota yang terdiri dari 450 Kecamatan dan 693 Kelurahan dan 5417 Desa. Sampai tahun 2022 sebanyak Desa di Sumatera Utara yang telah melaksanakan Bimbingan Teknik (BIMTEK) tentang SISKEUDES sebanyak 1464 dengan rincian BINTEK yaitu 250 Bimtek di Kabupaten Karo, 240 Bimtek di Kabupaten Langkat, 170 Bimtek di Kabupaten Nias, 105 Bimtek di Kabupaten Nias Barat, 52 Bimtek di Kabupaten Pakpak Barat, 128 Bimtek di Kabupaten Samosir, 211 Bimtek di Kabupaten Tapanuli Selatan, 159 Bimtek di Kabupaten Tapanuli Tengah, 98 Bimtek di Kota Gunung Sitoli dan 42 Bimtek di Kota Padang Sidempuan.

Untuk informasi Desa yang telah mengimplementasikan SISKEUDES dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Sebaran Imple,entasi Desa yang telah SISKEUDES

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Desa | Bimtek (desa) | Jumlah Desa yang Sudah Implementasi SISKEUDES |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---|
| 1 | Kab. Asahan | 177 | 0 | 177 |
| 2 | Kab. Batu Bara | 141 | 0 | 0 |
| 3 | Kab. Dairi | 161 | 0 | 161 |
| 4 | Kab. Deli Serdang | 380 | 0 | 380 |
| 5 | Kab. Humbang Hasundutan | 153 | 0 | 153 |
| 6 | Kab. Karo | 259 | 259 | 258 |
| 7 | Kab. Labuhanbatu | 75 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 52 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Labuhanbatu Utara | 82 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Langkat | 240 | 240 | 240 |
| 11 | Kab. Mandailing Natal | 377 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Nias | 170 | 170 | 0 |
| 13 | Kab. Nias Barat | 105 | 105 | 0 |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 459 | 0 | 0 |
| 15 | Kab. Nias Utara | 112 | 0 | 0 |
| 16 | Kab. Padanglawas | 303 | 0 | 0 |
| 17 | Kab. Padanglawas Utara | 386 | 0 | 0 |
| 18 | Kab. Pakpak Bharat | 52 | 52 | 0 |
| 19 | Kab. Samosir | 128 | 128 | 0 |
| 20 | Kab. Serdang Bedagai | 237 | 0 | 0 |
| 21 | Kab. Simalungun | 386 | 0 | 0 |
| 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 211 | 211 | 211 |
| 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 159 | 159 | 159 |
| 24 | Kab. Tapanuli Utara | 241 | 0 | 0 |
| 25 | Kab. Toba Samosir | 231 | 0 | 0 |
| 26 | Kota Gunungsitoli | 98 | 98 | 98 |
| 27 | Kota Padangsidimpuan | 42 | 42 | 0 |
| JUMLAH | | 5417 | 1464 | 1837 |

Sunber: BPKP Provinsi Sumut dengan Data diolah, 2023

Dari informasi diatas, dapat dilihat sebuah ketimpangan dimana terdapat Desa yang telah melaksanakan BIMTEK namun belum mengimplementasikan SISKEUDES dan terdapat Desa yang telah mengimplementasikan SISKEUDES namun belum melaksanakan BIMTEK sehingga dapat diidentifikasi bahwa SISKEUDES yang telah berjalan pada beberapa Desa-Desa di Provinsi Sumatera Utara belum berhasil secara implemansi yang didukung oleh belum tersenggaranya adanya BIMTEK terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa secara Digital. Untuk Kabupaten Langkat berdasarkan informasi tabel diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh Desa yang berjumlah 240 Desa telah mengimplementasikan SISKEUDES sampai tahun 2022 ini dalam fungsi pengelolaan keuangan Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Implementasi SISKEUDES telah berjalan dan untuk tingkat kebermanfaatannya diuraikan hasil dari wawancara kepada salah satu Desa di Kabupaten Langkat yaitu Pada Desa Pematang Serai, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut :

1) Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa yaitu tentang Perencanaan SISKEUDES didapatkan informasi sebagai berikut:

“Perencanaan telah sesuai dengan Visi, Misi, dan Sasaran Desa yang dituangkan RJPMD pada SISKEUDES dan visi yang dibangun adalah visi yang merupakan turunan dari Visi Kabupaten Langkat sehingga telah bersinergi antara visi Kabupaten dengan visi Desa”.

Selanjutnya dari informasi wawancara diatas maka Peneliti menganalisa bahwa dalam Perencanaan dan Penganggaran melalui SISKEUDES pada Desa Pematang Serai telah sesuai dengan SISKEUDES yang telah menginformasikan Visi, Misi dan Sasaran telah secara jelas teruraikan didalam RJPMD serta visi desa yang dibangun merupakan turunan dari Visi Kabupaten Langkat.

2) Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa yaitu tentang Penganggaran SISKEUDES didapatkan informasi sebagai berikut:

“Untuk Anggaran yang dituangkan RJPMD dan RKP juga telah terinput baik dan rinci Program dan Subprogram kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing namun masih sangat perlu diperlukan sekali bimbingan tentang pengelolaan pengoprasian sistem penganggaran secara berkelanjutan serta masih diperlukan sekali masukan-masukan dari masyarakat desa yang lebih kritis dalam memberikan masukan pada kegiatan Musrembang.”

Proses Penganggaran yang dituangkan pada RJPMD dan RKP Desa telah dapat dikatakan baik dan termuat pada SISKEUDES Desa yang telah terisi informasi Anggaran pada setiap Menu Pendapatan dari seluruh Pendapatan Pemerintah Desa dan Pembiayaan/Belanja pada seluruh Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Desa dalam menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3) Penatausahaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa yaitu tentang Penatausahaan SISKEUDES didapatkan informasi sebagai berikut:

“Tentang Penatausahaan melalui SISKEUDES Pada Desa Pematang Serai telah dilaksanakan sesuai dengan Modul SISKEUDES tahun 2018 terhadap aktivitas Penatausahaan terhadap aspek Penerimaan dan Pengeluaran serta juga telah melaksanakan fungsi penatausahaan terhadap pencairan SPP, Pajak dan Pemindahan Nilai Kas.

Setiap Program kerja yang dilaksanakan, semuanya telah sesuai dengan RJPMD Desa namun masih sering terjadi keterlambatan dalam proses pencairan pendanaan sehingga

aktivitas program kerja yang sudah direncanakan sering mengalami kemunduran dalam proses pelaksanaa”.

Selanjutnya dari informasi wawancara diatas maka Peneliti menganalisa bahwa dalam Penatausahaan melalui SISKEUDES Pada Desa Pematang Serai telah sesuai dengan SISKEUDES baik dari segi Perisapan Penatausahaan, Penatausahaan Penerimaan, Penatausahaan Pengeluaran, Pencairan SPP, Penyetoran Pajak dan Informasi Mutasi Kas pada seluruh Aktivitas Penatausahaan Pemerintah Desa Pematang Serai. Namun dari sisi kecepatan pencairan pendanaan kegiatan sering masih mengalami keterlambatan sehingga proses pelaksanaan program kerja pada RJMPD akhirnya mengalami kemunduran dalam pelaksanaan kegiatan.

4) Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa yaitu tentang Pelaporan SISKEUDES didapatkan informasi sebagai berikut:

“Desa Pematang Serai telah melaksanakan pelaporan terhadap Anggaran dan Pendapatan Desa sesuai Ketentuan yang telah dilaporkan setiap akhir tahun Anggaran seperti adanya laporan Realisasi APBDes dan Informasi Catatan laporan keuangan yang diinput melalui SISKEUDE namun dari segi ketepatanwaktu, Pelaporan Keuangan Desa masih sering mengalami keterlambatan disebabkan program kerja yang belum selesai dilaporkan”.

Selanjutnya dari informasi wawancara diatas maka Peneliti menganalisa bahwa dalam Fungsi Pelaporan melalui SISKEUDES Pada Desa Pematang Serai saat ini telah melalui sistem SISKEUDES dan tahapan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana laporan yang disajikan Desa telah tersedia Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya Laporan tersebut menjadi masukan dalam Pelaporan SISKEUDES yang telah menyajikan Laporan Pembukaan Pemerintah Desa antara lain: Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (Bulanan, Triwulan, Semester), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Anggaran Per Sumber Dana, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225. Sedangkan dari sisi, tepat waktu Pelaporan Keuangan Desa masih sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan yang disebabkan masih ada beberapa Program kegiatan yang belum selesai dilaksanakan sehingga menggagu aktivitas pelaporan keuangan desa.

5) Kompilasi Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa yaitu tentang Kompilasi Data SISKEUDES didapatkan informasi sebagai berikut:

“Desa Pematang Serai telah menyajikan informasi tentang Kompilasi Data pada SISKEUDES antara Data yang satu dengan data yang lainnya seperti Penganggaran dengan Penatausahaan atau dengan Pembukaan yang turut serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Kompilasi Data”.

Selanjutnya dari informasi wawancara diatas maka Peneliti menganalisa bahwa dalam Fungsi Kompilasi Data melalui SISKEUDES Pada Desa Pematang Serai saat ini dijalankan sesuai dengan ketentuan Pedoman Keuangan SISKEUDES yang bersajikan informasi tentang Kompilasi Data Anggaran, Data Penatausahaan, Data Pembukaan dan Kompilasi Data Secara Keseluruhan.

Strategi Keberhasilan Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pada Desa Pematang Serai

Setelah peneliti mampu mengidentifikasi Implementasi SISKEUDES Pada Desa Pematang Serai, Selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap strategi keberhasilan yang harus dibangun oleh Pemerintah Desa Pematang Serai dalam mewujudkan fungsi Akuntabilitas dengan terlebih dahulu melakukan kajian evaluasi penerapan SISKEUDES dengan melihat setiap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis SWOT

| Kekuatan (<i>Strengths</i>) |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Desa Telah memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang jelas dan terukur.2. Desa Telah memiliki Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Menengah.3. Adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Desa akan SISKEUDES.4. Pemerintah Desa telah memiliki struktur organisasi yang memadai dalam mendukung penerapan SISKEUDES.5. Masyarakat telah berperan dalam meningkatkan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah.6. Sebagian besar SDM telah berpendidikan Sarjana.7. Desa telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai dalam pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES.8. Telah dilaksanakannya BIMTEK (Bimbingan Teknis) terhadap aparatur Pemerintah Desa.9. Desa telah memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai dan lengkap dalam mendukung implementasi SISKEUDES. |
| Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
| <ol style="list-style-type: none">1. Visi, Misi, Tujuan Desa masih belum sepenuhnya mencakup kebutuhan dan permasalahan desa yang terus berkembang.2. Proses Birokrasi sedikit menghambat pelaksanaan SISKEUDES secara maksimal.3. Pelaporan Keuangan Desa terkadang masih terlambat disebabkan kurangnya jumlah SDM yang berkompeten.4. Masyarakat belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara berkala dan berkelanjutan.5. Beberapa SDM belum memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola SISKEUDES.6. Perlunya Pemuktahiran Sarana dan Prasarana yang lebih lengkap dan update sesuai dengan kebutuhan penggunaan SISKEUDES.7. Jumlah Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang dilaksanakan belum berkelanjutan. |
| Peluang (<i>Opportunities</i>) |
| <ol style="list-style-type: none">1. Adanya Regulasi tentang SISKEUDES yang akan masih berpotensi berkembang kearah positif2. Adanya dukungan dari BPKP Provinsi yang bersedia mendampingi proses pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES.3. Terdapat sumber pendanaan dalam pengembangan kompetensi SDM dalam mendapatkan pelatihan SISKEUDES.4. Desa memiliki kesempatan dalam mendapatkan pengembangan sarana dan prasarana SISKEUDES. |
| Ancaman (<i>Threats</i>) |

1. Adanya potensi kehilangan data/ kemandan data dalam SISKEUDES.
2. Indikator SISKEUDES versi 2018 belum sepenuhnya menyesuaikan terhadap Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya, dari hasil analisis pemetaan terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman dan Peluang peneliti membuat identifikasi strategi keberhasilan implementasi SISKEUDES dalam meningkatkan Akuntabilitas Pada Desa Pematang Serai yaitu menggunakan Strategi Pendekatan : **Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Oppurtunities*)** dengan uraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Mutu Visi, Misi, dan Tujuan Desa yang mengedepankan isu pembangunan nasional/ daerah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki
2. Peningkatan Mutu Program Kerja Desa Pada RJPMD dan RKP yang telah analisis dengan melihat potensi pertumbuhan pendapatan dan potensi efisiensi belanja desa.
3. Peningkatan Kualitas SDM dalam menghasilkan informasi SISKEUDES melalui pendampingan berkelanjutan dari BPKP.
4. Peningkatan Pembangunan SDM Berkualitas melalui Program Kerjasama dengan lembaga pendidikan.

Pembahasan

Desa Pematang Serai merupakan 1 dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa berbasis Digital yaitu SISKEUDES. Desa Pematang Serai saat telah memiliki 7 buah dusun yang tersebar pada secara berdekatan dengan dusun-dusun lainnya. Kondisi masyarakat pada Desa Pematang Serai sebagian berprofesi pada bidang Pertanian, Perikanan, UMKM, Peternakan dan Sektor Wisata dan ditahun 2022 ini Desa Pematang Serai memiliki banyak program kerja seperti Manajemen Wisata, Promosi Wisata Desa, UMKM Masyarakat Desa, Kesehatan Masyarakat dan Ekowisata Kearifan Lokal dengan dukungan Masyarakat dan Universitas.

Dari hasil penelitian diatas, menyebutkan bahwa Implementasi SISKEUDES pada Desa Pematang Serai telah berjalan dengan baik namun masih ada terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan SISKEUDES-nya seperti Kemuktahiran Sarana & Prasarana yang memadai dalam pengelolaan, Pelatihan SISKEUDES yang berkelanjutan SDM yang berkompeten secara akademik sehingga dapat lebih memperluas fungsi pengelolaan keuangan desa baik secara sistem informasi maupun secara langsung. Hasil Peneliti ini juga sejalan dengan hasil penelitian Fanani, Z. (2018) yang menyebutkan implementasi aplikasi sistem keuangan desa pada pemerintah daerah kabupaten Nganjuk dengan menggunakan workshop ini sangat efektif dan efisien namun ketidakpatuhan terhadap siklus dan keterlambatan pencairan dana, kapasitas dan personalia, pembangunan tidak berbasis padat karya dan tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah dan sejalan dengan hal tersebut juga oleh Risandi, R., & Palenewen, J. D. O. (2022) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kesulitan yang dihadapi oleh aparatur desa Bundar yaitu pada jaringan internet yang terkadang bagus dan terkadang juga susah, mengingat aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang berbasis *online* tentu saja dalam pengoperasiannya memerlukan jaringan internet.

Melihat dari informasi tersebut, maka Probematika dalam pengelolaan Keuangan Berbasis SISKEUDES ini bukan hanya jadi permasalahan Desa saja tetapi juga menjadi permasalahan Pemerintah Pusat yang dimana harus saling mendukung dan bersinergi dalam

mewujudkan *Good Governance* dan Digitalisasi pada setiap aspek pemerintah yaitu dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa.

Visi dan Misi yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Perangkat Peraturan yang memadai dan Pembangunan Kualitas Sarana dan Prasarana baru dibangun secara berkelanjutan sehingga aspek-aspek yang telah dibangun nantinya akan terus dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi untuk menuju *Good Village Governace*.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah identifikasi strategi keberhasilan implementasi dari SISKEUDES pada Desa Pematang Serai yang dirangkai sebagai berikut: Peningkatan Kualitas Mutu Visi, Misi, dan Tujuan Desa yang mengedepankan isu pembangunan nasional/ daerah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan Mutu Program Kerja Desa Pada RJPMD dan RKP yang telah analisis dengan melihat potensi pertumbuhan pendapatan dan potensi efisiensi belanja desa. Peningkatan Kualitas SDM dalam menghasilkan informasi SISKEUDES melalui pendampingan berkelanjutan dari BPKP. Peningkatan Pembangunan SDM Berkualitas melalui Program Kerjasama dengan lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. Diklat Teknis Substansi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2016
- BPKP. Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0 tahun 2018.
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa Berbasis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yogyakarta: Goyen Publishing
- Fanani, Z. (2018). Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 2(4), 468-489.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Behavioral Accounting Journal, 3(1), 1-20.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa.
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun.
- Risandi, R., & Palenewen, J. D. O. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Pengelolaan Keuangan Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin, 9(1), 407-412.
- Sugiyono (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyowati, S. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105-111.

Yudoyono, S. B., Amal, I., Effendi, S., & Mas'ud, M. (2002). Good Governance dan Otonomi Daerah.